

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupate 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penja Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 sebagai APBK Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Ut Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Per (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tamb Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penge Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Negara Republik Indonesia Nomor 4520) sebagaimana telah diu Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lem Nomor 5340)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lem Nomr 4575
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamb Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang ten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor Republik Indonesia Nommor 4576 Sebagaimana telaj diub Nomor 65 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nom informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 110,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapora Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Hak Keu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Le Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republi
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pin Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lem Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diub Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pe Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaks

Tahun 2014 Tentang Desa;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 2017 Nomor 106);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelo Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamb Indonesia Nomor 6322)
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun Pendapatan dan Belanja Negara Tahu Anggaran 2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir denga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Indonesia 2013 Nomor 146);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenta Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Ment 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosi Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana tel dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemerintash Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bers dan Belanja Negara;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 te (Berita Negara Republuik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tent Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nege Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang M Penyelenggaraan urusan Pemerintah (Berita Negara Republu 197);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
33. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Po Daerah;
34. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2018 Tent Kabupaten Tahun Anggaran 2019
35. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pem Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

36. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 38 Tahun 201
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun A
diubah,Trakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENJAB
BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 35 YAHUN 2019 TENTA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
2019;**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	110.086.215.247,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	801.556.255.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	456.891.044.768,00
Jumlah Pendapatan	RP.	1.337.533.515.015,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	419.724.052.788,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	13.530.500.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	3.269.437.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Dan partai Politik	Rp.	348.801.698.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	12.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	RP.	797.325.687.788,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	89.718.103.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	307.945.534.464,00
3) Belanja Modal	Rp.	250.239.142.996,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	647.902.780.960
Jumlah Belanja	Rp.	1.445.228.468.748,00
Surpuls / (Defisit)	Rp.	(67.694.953.733,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	68.994.953.733,00
b. Pengeluaran	Rp.	1.300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	67.684.953.733.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	RP.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada Tanggal : 21 Oktober 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 035.